

## KINERJA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha\*, Clara Maulida, Indah Sintha, Tatiya Khodyzah, Wilma Juwita,  
Yulyshya Sartika

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

E-mail: [dadan.setianugaraha@gmail.com](mailto:dadan.setianugaraha@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*This study aims to determine how the performance of the Sumedang Regency Environment and Forestry Service (DLHK) in management and to find out what are the performance obstacles of the Sumedang Regency Environmental and Forestry Service (DLHK) in waste management. This type of research uses qualitative methods. The population in this study were all employees of the Sumedang Regency Environment and Forestry Service (DLHK) involved in handling waste in the waste management sector, and officers in the field (cleaning task force). Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. Based on this research, it can be concluded that the performance of the Sumedang Regency Environmental and Forestry Service (DLHK) in Waste Management is quite good. This is in accordance with what is stated in the Standard Operating Procedure (SOP) of the Environment and Forestry Service (DLHK) in the field of waste management. The obstacles faced by the Environment and Forestry Service with regard to waste management are the lack of a waste transport fleet and the minimum number of cleaning workers.*

**KeyWord:** Human Resources, Performance Management.

### PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena pengolahan sampah yang ada selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengolahan sampah yang berkelanjutan berwawasan lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif, maka dibutuhkan suatu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan terpadu agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan yang tertera pada UndangUndang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2008 (pasal 1) tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah yaitu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Seperti halnya masalah pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumedang, masih banyak ditemui permasalahan baik dari sisi pemerintah mau pun masyarakat. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan yang mampu mempengaruhi produksi sampah di Kabupaten Sumedang. Permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Sumedang tentunya menjadi persoalan besar bagi pemerintah Kabupaten Sumedang, karena masih ditemuinya wilayah yang belum terlayani pelayanan persampahan.

Permasalahan persampahan di kabupaten Sumedang bukan hanya disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang tinggi saja, namun disebabkan pula dari

rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan khususnya dalam bidang pelayanan persampahan, yang mengakibatkan penanganan sampah yang tidak tuntas sehingga menimbulkan adanya timbunan-timbunan sampah yang tidak terangkut setiap harinya. Setiap harinya, perkiraan volume sampah yang dihasilkan Kabupaten Sumedang adalah 3.270 m<sup>3</sup> dan volume sampah yang tertangani oleh pemerintah Kabupaten melalui Badan Lingkungan Hidup baru 60%. Badan Lingkungan Hidup melakukan kajian analisis timbulan sampah Kabupaten Sumedang, dari hasil analisis disimpulkan volume standar timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 2,75 liter per orang per hari. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang maka volume sampah yang dihasilkan adalah 3,094 juta liter atau 3.094 m<sup>3</sup> per hari (1.154.458 jiwa tahun 2019 akhir).

Masalah sampah setiap harinya bertambah sehingga membutuhkan perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan. Dalam penanganan dan pengelolaan sampah kabupaten Sumedang, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang sebagai Dinas yang berwenang dan bertugas di bidang pengelolaan sampah dituntut untuk bekerja secara optimal. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan. Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam pengelolaan sampah, memiliki peran dalam penyelenggaraan pengelolaan atas berbagai sampah di Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK di Kabupaten Sumedang diperlukan kesiapan yang baik demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun non fisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan maka untuk lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi. Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kinerja organisasi yang ideal adalah organisasi yang mampu berbuat banyak dengan sumber yang terbatas, mempunyai kualitas layanan publik yang maksimal, mempunyai responabilitas yang baik yaitu mengenal kebutuhan masyarakat dan menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta adanya akuntabilitas yaitu harus memprioritaskan kepentingan publik.

Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang belum maksimal, dikarenakan adanya kekurangan dalam sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Padahal hal tersebut merupakan penunjang kinerja yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja.

Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa gejala yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang belum optimal, hal tersebut disebabkan karena indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Sumedang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Karena jika dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon yang memiliki satgas kebersihan sebanyak ±400 orang sedangkan di Kabupaten Sumedang

yang memiliki wilayah lebih luas hanya memiliki 230 orang satgas kebersihan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan sampah, seperti kurangnya cator dan dumbtruck untuk mengangkut sampah yang baru ada ±17 unit drumbtruck.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Kinerja Organisasi

Menurut Surjadi (2009) mendefinisikan bahwa kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi bahwa kinerja organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian Sobandi (2006) menyatakan bahwa, kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah di capai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit* maupun *impact*.

Selanjutnya Simanjutak (2005) mengemukakan pendapatnya tentang kinerja organisasi bahwa, kinerja organisasi merupakan agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di organisasi tersebut.

Dengan demikian kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu dukungan organisasi, kemampuan manajemen dan kinerja setiap orang yang bekerja di organisasi tersebut. Kinerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi antara lain dalam penyusunan struktur organisasi, pemilihan teknologi dan penyediaan prasarana serta sasaran kerja

### Dimensi Kinerja Organisasi

Pada dasarnya kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang menjadi

faktor dalam kinerja organisasi yang ideal menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2014) adalah :

1. Produktivitas, merupakan hubungan antara input dan output yang bisa mendorong pemerintah untuk mampu berbuat banyak dengan sumber-sumber yang terbatas.
2. Kualitas layanan, merupakan indikator yang relatif tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah digunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja organisasi.
3. Responsivitas, merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Responibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit dan implisit.
5. Akuntabilitas, tingkat pertanggung jawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

### Faktor Penghambat Kinerja Organisasi

Selanjutnya Mangkunegara (2005: 16) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat/kendala dalam kegiatan optimalisasi kinerja organisasi, yaitu:

1. Individu. Hambatan dalam suatu kinerja organisasi salah satunya yaitu faktor individu, hal ini dapat dilihat dari integritas seseorang yang kurang seperti kurang konsisten antara tindakan dengan prinsip dan tidak fokus terhadap pekerjaan atau konsentrasi yang kurang. Apabila hal tersebut terjadi di dalam suatu organisasi, maka kinerja organisasi

tersebut tidak akan optimal. Adapun indikator dari faktor individu yaitu: 1) Lemahnya integritas pegawai; dan 2) Kurangnya konsentrasi saat bekerja

2. Lingkungan Organisasi. Hambatan kedua dalam kinerja yaitu faktor lingkungan organisasi. Faktor ini dapat menghambat kinerja organisasi dalam hal kurangnya sarana pendukung atau fasilitas dan hubungan kerja yang kurang harmonis. Adapun indikator dari lingkungan organisasi yaitu: 1) Kurangnya fasilitas pendukung dalam bekerja.; 2) Hubungan kerja yang tidak baik.

## METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Sasaran penelitian adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Sedangkan informan penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kehutanan Kabupaten Sumedang, Kasi Pembinaan dan Kemitraan Pengelolaan

Sampah, Kasi Pelayanan Kebersihan, Staf Pengelolaan sampah, dan Satgas kebersihan.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dilakukan melalui: Studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh sebagai berikut : *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data), dan *Conclusion drawing verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Dalam Pengelolaan Sampah

- a. Produktifitas

Produktifitas merupakan hubungan antara input dan output yang bisa mendorong pemerintah untuk mampu berbuat banyak dengan sumber-sumber yang terbatas, Produktifitas kinerja DLHK Kabupaten Sumedang dilihat dari efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan efisiensi dan efektifitas

pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang sudah baik dengan memanfaatkan sarana, prasarana, bahan bakar, dan sumber daya manusia untuk memaksimalkan pelayanan pengelolaan sampah di setiap daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi setiap daerahnya.

- b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan, merupakan indikator yang relatif tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang

mudah dan murah digunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja organisasi. Kualitas layanan DLHK Kabupaten Sumedang dilihat dari standar pelayanan yang jelas dan kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. DLHK sudah memberikan pelayanan yang baik berlandaskan pada UU No 13 Tahun 2008 serta sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang masyarakat sudah terlihat puas dengan pelayanan yang diberikan DLHK dengan baik yang menunjukkan angka kepuasan 87 dari 100.

#### c. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat Responsivitas kinerja DLHK Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan sampah untuk menangani sampah seperti mengambil sampah masyarakat di tempatnya masing-masing atau di depo yang sudah tersedia. DLHK mengenal kebutuhan masyarakat sehingga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat sangat berantusias dengan adanya pelayanan ini. Namun DLHK tetap bekerja keras untuk mengoptimalkan tugasnya dalam pengelolaan sampah sebanyak 70 % di Kabupaten Sumedang. DLHK juga mengembangkan program-program DLHK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penanganan sampah yaitu TPS 3R, Rumah kompos, bank sampah, dan sistem online URC.

#### d. Responibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik

yang eksplisit dan implisit. Kinerja DLHK Kabupaten Sumedang mempunyai kejelasan tanggung jawab dan wewenang yang sesuai dengan RPJMD, Undang-undang dan tupoksi masing-masing tiap pegawai. Agar para pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Selain itu pegawai memiliki komitmen terhadap tugas yang berikan sesuai dengan PerBup, visi dan misi DLHK, motto bidang PSP. Sehingga adanya target dalam pencapaian tujuan yang menjadi komitmen setiap pegawai untuk mencapai target tersebut. Ini menyatakan bahwa kinerja DLHK Kabupaten Sumedang sudah melaksanakan kegiatan birokrasi publik sesuai dengan prinsip administrasi.

#### e. Akuntabilitas

Tingkat pertanggung jawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Pertanggung jawaban DLHK terhadap tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang ada, jika dilanggar telah ada sanksi yang tegas. Evaluasi kinerjaapun dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kinerja pegawai DLHK.

### **Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Dalam Pengelolaan Sampah**

#### a. Individu

Integritas pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang sangat baik, dan tidak ada temuan integritas pegawai yang lemah. Pasukan kuning yang selalu siap tanggap dalam

melaksanakan setiap tugasnya. Sehingga integritas pegawai terhadap organisasi menjadi optimal.

Konsentrasi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang sudah baik, tidak ada hambatan - hambatan mengenai kurangnya konsentrasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Para pegawai mendapatkan reward ketika menyelesaikan tugasnya dengan baik.

#### b. Lingkungan

Fasilitas dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang yaitu kurangnya fasilitas kendaraan seperti dump truk dan beca motor (cator) serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga banyak daerah yang tidak terlayani.

Hubungan kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang baik, saling kerjasama. hubungan kerja dan komunikasi yang dijalin antar pegawai harmonis. Hubungan kerja yang tidak baik di DLHK dapat diselesaikan dengan musyawarah atau klarifikasi apa yang jadi masalah bisa cepat dikoreksi, sehingga hasil kerja sesuai yang diharapkan dan pegawai saling mendukung.

### **Upaya mengatasi faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang**

#### a. Individu

Untuk meningkatkan integritas pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang yaitu dengan upaya upaya peningkatan

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Produktivitas DLHK Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik. Secara keseluruhan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pelayanan pengelolaan sampah sudah baik dengan menjalankan program-program dan memanfaatkan sarana dan

kinerja pegawai. Melakukan brifing staf dan selalu ditekankan dalam setiap apel pagi, sehingga lebih optimal dalam melaksanakan tugas.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang adalah dengan cara memberikan motivasi yang bersifat membangun semangat pegawai dalam bekerja, mengadakan liburan, meningkatkan kesejahteraan pegawai, menambah prasarana atau memperbaiki prasarana yang ada agar pegawai lebih fokus dalam bekerja serta menambah SDM agar pekerjaan menjadi ringan.

#### b. Lingkungan

Upaya untuk memenuhi fasilitas pendukung dalam bekerja adalah dengan menambah anggaran untuk menambah fasilitas berupa sarana prasarana dan mengadakan kemitraan yayasan peduli lingkungan, karang taruna (karta), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan mengadakan membersihkan sungai, jumat bersih sehat (jumsihat), dan madratata, sehingga bisa menunjang pekerjaan menjadi lebih baik.

Upaya yang dilakukan oleh DLHK untuk meningkatkan hubungan kerja yang baik adalah dengan meningkatkan koordinasi agar hubungan kerja menjadi harmonis, saling tukar informasi, saling membantu dan mendukung dalam bekerja, menanamkan semangat saling memiliki dan menciptakan hubungan saling kekeluargaan antar pegawai guna menciptakan hubungan kerja yang baik.

prasarana serta sumber daya manusia secukupnya untuk hasil yang maksimal.

DLHK Kabupaten Sumedang memberikan layanan sesuai dengan berlandaskan pada UU No 13 Tahun 2008 namun layanan yang diberikan kepada masyarakat belum secara merata, layanan hanya berfokus pada pusat kota

sedangkan kecamatan yang berada di pinggiran kota belum di perhatikan secara maksimal.

Pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sampah DLHK kabupaten Sumedang dilakukan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing pegawai sehingga pegawai menyelesaikan kewajiban moral dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu setiao pegawai DLHK Kabupaten Sumedang mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan dalam pengelolaan sampah tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fahmi, Irham.2013. *Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi dan Kasus*. Bandung: Alfabeta
- Iskandar, J. 2006. *Kapita Selekta Administrasi Negara*. Bandung: Puspaqa.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama
- Moeheriono. 2010. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sudarmanto.2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT Grasindo. Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Uha, Ismail Nawawi. 2017. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja (Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, Dan Kinerja Organisasi)*. Depok: Kencana.

#### Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanan DLHK Kabupaten Sumedang sehingga pelayanan dalam pengelolaan sampah merata hingga ke daerah pelosok tidak hanya di pusat kota Kabupaten Sumedang
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana seperti armada untuk pengangkutan sampah, serta penambahan Satgas Kebersihan agar tujuan dalam menangani sampah bisa mencapai lebih dari capaian semestinya yaitu 70%.